



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

# LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA)

**Tahun 2025**



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang ..... 3
- 1.2. Landasan Hukum ..... 4
- 1.3. Maksud dan Tujuan ..... 5
  - 1.3.1. Maksud ..... 5
  - 1.2.1. Tujuan ..... 6
- 1.4. Sistematika Penulisan ..... 6

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun  
Lalu ..... 7
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 19
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo  
Provinsi Jambi ..... 20
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 22
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 28

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMINFO PROVINSI JAMBI

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... 29
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Provinsi Jambi ..... 31
- 3.3 Program dan Kegiatan ..... 33

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMINFO PROVINSI JAMBI

- 4.1 Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025 ..... 38
- 4.2 Rencana Pendanaan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025 ..... 52

### BAB V PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 periode (satu) Tahun, Renja Tahun Anggaran 2025 ini sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan organisasi yaitu urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang membidangi pembangunan dan penyebarluasan informasi, pengembangan dan pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi merupakan aspek yang menyajikan fasilitas terhadap berbagai kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat, organisasi termasuk dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik.

Salah satu upaya guna mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik elektronik government (E-gov) yang dimaknai sebagai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar mendapatkan hasil yang optimal maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rancangan belanja dinas, prioritas kegiatan dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diharapkan Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika mampu terintegrasi dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Daerah Provinsi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025 ini disusun dengan mempedomani :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  6. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang satu Data Indonesia.
  8. Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
  9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Rancangan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### **1.2.1. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas kominfo pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dilihat dari capaian kinerja secara fisik dan 98.13% dari capaian realisasi Keuangan. Dilihat lebih lanjut dari capaian kinerja Dinas Kominfo tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target; dan
3. Target dengan capaian realisasi di atas 76%-90% sebanyak 5 target

Lebih lanjut capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo dan Capaian Renstra Diskominfo s/d Tahun 2024 Provinsi Jambi**

1	2	3	4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			8	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
				5	6	7=(6/5)		9=(4+6+8)	10=(9/3)
Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskominfo) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Renja Diskominfo Tahun 2023	Realisasi Renja Diskominfo tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Diskominfo tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG SEKERTARIAT</b>									
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Meningkatnya Nilai SAKIP</b>	<b>77</b>		<b>70 (BB)</b>			<b>75</b>		
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas perencanaan OPD</b>	<b>70</b>		<b>63</b>	<b>63</b>		<b>65</b>	<b>65</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2	2 Dokumen	2	1	2 Dokumen	6	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2	3 Dokumen	2	1		4	

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2	3 Dokumen	2	1		4	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2	2 Kegiatan	2	1	3 Laporan	7	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan</b>	<b>90</b>		<b>83</b>	<b>83</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	14	72 Orang	72	1	90 Orang/ Bulan	90	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12	12 Dokumen	12	1	12 Dokumen	36	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1	12 Dokumen	12	1	1 Dokumen	14	
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan Bimtek/Diklat bagi ASN</b>	<b>65</b>		<b>40</b>	<b>40</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	15	25 Orang			25 Orang		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	-	150 Paket	150		-		
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum OPD</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	1	2 Paket	2	1	2 Paket	5	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1	12 Paket	12	1	12 Paket	25	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	8	6 Paket	6	1	6 Paket	20	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5	5 Dokumen	5	1	5 Dokumen	15	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1	2 Dokumen	2	1	12 Laporan	15	

<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang/peralatan kantor</b>	<b>85%</b>		<b>80%</b>	<b>80</b>		<b>83%</b>	<b>83</b>	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	20 Paket	24	20 Paket	20	1		44	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17 Unit	60	14 Unit	14		17 unit		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-						
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang/peralatan kantor</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	100	1 Laporan	1	1	1 Laporan	3	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1	2 Laporan	2	1	1 Laporan	4	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	100	1 Laporan	1	1	1 Laporan	3	

<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan Barang Milik daerah</b>	<b>89%</b>		<b>85%</b>	<b>85</b>		<b>87%</b>	<b>87</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 Unit	24	26 Unit			26 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	100	1 Gedung/Kantor			2 Unit		
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	26 unit	100	24 unit					
<b>BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK</b>									
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan publik</b>	<b>65</b>		<b>55</b>			<b>60</b>		

	Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah	85		80			85		
<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>90%</b>		<b>80%</b>	<b>80</b>		<b>85%</b>	<b>85</b>	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Rekomendasi*	70	6 Dokumen	6	1	12 Dokumen	18*	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	220 Media*	76	5 Dokumen	5	1	12 Dokumen	17*	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan*	75	3 Dokumen	3	1	12 Dokumen	15*	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	35 Komunitas*	98	7 Dokumen	7	1	8 Dokumen	15*	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	180 Orang	70	60 Orang	60	1	180 Orang	240	

Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Laporan*	98	1 Dokumen	1	1	12 Dokumen	13*	
<b>BIDANG E-GOVERNMENT</b>									
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Indeks SPBE Provinsi Jambi</b>	-		<b>70</b>			<b>75</b>		
<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Tersedianya domain dan sub domain yang terstruktur</b>	<b>89</b>		<b>80</b>	<b>80</b>		<b>83</b>	<b>83</b>	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	65	1 Dokumen	1	1	1 Dokumen	2*	
<b>Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase perangkat dan sistem informasi penunjang penerapan SPBE di Provinsi Jambi</b>	<b>80%</b>		<b>70%</b>	<b>70</b>		<b>72%</b>	<b>72</b>	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-	1 Laporan*	45	2 Dokumen	2	1	1 Dokumen	3*	

	government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi								
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	21 Aplikasi	45	5 Aplikasi	5	1	12 Unit	62	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	20	3 Dokumen	3	1	2 Dokumen	25	
Pengelolaan Government chief information officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	12 Dokumen	1	5 Dokumen	5	1	4 Dokumen	10	
<b>BIDANG STATISTIK</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK</b>									
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase ketersediaan data statistik sektoral</b>	<b>80%</b>		<b>50%</b>			<b>70%</b>		

<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Statistik sektoral Dalam Perencanaan Dalam Ekspose Pembangunan Daerah</b>	<b>80%</b>		<b>50%</b>	<b>50</b>		<b>70%</b>	<b>70</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	108 Orang*	43	3 Dokumen	3	1	3 Dokumen	6	
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	90 Persentase*	130	65 Orang	65 Orang	1	65 Orang	260	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	43	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3*	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									
<b>BIDANG PERSANDIAN</b>									

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	INDEKS KEMATANGAN KEAMANAN INFORMASI	-		LV.I	LV.I – LV.II		LV.II		
	TINGKAT KEMATANGAN KEAMANAN INFORMASI			53%	52				
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Mewujudkan Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis eletronik (SPBE) dan Non Elektronik	56%		40%	40		45%	45	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi, dan kebijakan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	3	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	12	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	14	

	Provinsi Jambi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah	10	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	1	15 Perangkat Daerah	35	
<b>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jambi</b>			-			<b>29%</b>	<b>29</b>	
Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10 Perangkat Daerah	-	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	1	10 Perangkat Daerah	20	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi atas capaian kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tertera pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo			80%	85%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			80%	85%	90%	95%	90%	90%	90%	90%	
3.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			75%	80%	85%	85%	80%		85%	85%	
4.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah			43%	45%	46%	47%	52%	58%	51%*	52%*	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kominfo Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen Bersama Perangkat daerah terkait keterbukaan Informasi publik pemerintah daerah mengingat sumber Informasi berasal dari Perangkat daerah dan menjamin ketersediaan layanan Informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat. Komitmen ini diperlukan untuk mendukung capaian SDGS tujuan nomor 16 dan menjamin penyelesaian sengeкта informasi publik.
2. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
3. Jumlah kerjasama dengan media melebihi target namun perlu memperhatikan kriteria yang harus dipenuhi oleh media.
4. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Jambi pada semua Perangkat Daerah serta jaringan intranet kepada pemerintah kabupaten/kota yang juga merupakan indikator nasional;
5. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Jambi dengan memperhatikan percepatan penerapan system penghubung layanan pemerintah daerah, optimalisasi layanan pemerintah berbasis elektronik, dan ;

6. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Jambi yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Jambi	<b>Meningkatnya Nilai SAKIP</b>	<b>85 (BB)</b>	<b>13,218,572,539</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Jambi	<b>persentase capaian kinerja</b>	<b>85 (BB)</b>	<b>13,218,572,539</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan OPD	88%	318,859,902	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan OPD	88%	318,859,902	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan	91%	10,391,444,200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan	91%	10,391,444,200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jambi	Persentase pelaksanaan Bimtek/Diklat bagi ASN	25%	395,688,800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jambi	Persentase pelaksanaan Bimtek/Diklat bagi ASN	25%	395,688,800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi	Persentase penyediaan	100%	921,420,408	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi	Persentase penyediaan	100%	921,420,408	

			Administrasi Umum OPD					Administrasi Umum OPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jambi	persentase tersedianya Barang/peralatan kantor	88%	1,149,879,274	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jambi	persentase tersedianya Barang/peralatan kantor	88%	1,149,879,274	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	41,279,955	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	41,279,955	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik daerah</i>	91%	734,048,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik daerah</i>	91%	734,048,800	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Jambi	<b>Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya</b>	<b>70</b>	<b>16,923,549,473</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Jambi	<b>Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah</b>	<b>85</b>	<b>16,923,549,473</b>	

			dan kemitraan publik							
			Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah	85						
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jambi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	95%	16,923,549,473	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jambi	Jumlah laporan dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada kementerian komunikasi dan informasi	95%	16,923,549,473

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Jambi	<b>Persentase pembangunan SPBE</b>	<b>50</b>					<b>50</b>		
3			<b>Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah</b>	-	7,355,953,684	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Jambi	<b>Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah</b>	-	7,355,953,684	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jambi	Tersedianya domain dan sub domain yang terstruktur	89	153,064,065	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jambi	<i>Jumlah dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah</i>	89	153,064,065	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jambi	Persentase perangkat dan sistem informasi penunjang penerapan	82%	7,202,889,619	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jambi	<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di</i>	82%	7,202,889,619	

			SPBE di Provinsi Jambi					<i>lingkungan pemda</i>			
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Jambi	<b>Persentase ketersediaan data statistik sektoral</b>	<b>90%</b>	<b>254,011,900</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Jambi	<b>Persentase ketersediaan data statistik sektoral</b>	<b>90%</b>	<b>254,011,900</b>	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jambi	Persentase Pemanfaatan Statistik sektoral Dalam Perencanaan Dalam Ekspose Pembangunan Daerah	<b>90%</b>	254,011,900	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jambi	<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>	<b>90%</b>	254,011,900	
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Jambi	<b>Indeks kematangan keamanan informasi</b>	-	<b>583,219,717</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Jambi	<b>Indeks kematangan keamanan informasi</b>	-	<b>583,219,717</b>	
			<b>Tingkat kematangan</b>	<b>54%</b>					<b>54%</b>		

			<b>keamanan informasi</b>								
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jambi	Mewujudkan Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Non Elektronik	66%	545,993,717	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jambi	<i>Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah yang ditetapkan</i>	66%	545,993,717	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Jambi	Terlaksananya Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jambi	86%	37,226,000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Jambi	<i>Terlaksananya Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jambi</i>	86%	37,226,000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sasaran Diskominfo ini juga mendukung sasaran pemerintah daerah yakni Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan indikator Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses internet. Usulan yang masuk dari Kabupaten-Kota se-Provinsi Jambi pada pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan keterhubungan jaringan Komunikasi dan Informasi pada setiap desa di Provinsi Jambi.

Upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2021-2026, salah satunya melalui Program Unggulan DUMISAKE. Sejalan dengan program DUMISAKE, usulan yang diterima dalam forum Perangkat daerah yakni pemerintah daerah kabupaten/kota mengusulkan Penyediaan internet di desa dan pembangunan tower di wilayah blank spot.

Dalam pengadaan internet bagi desa yang masuk dalam kategori blank spot digunakan 3 metode atau cara agar dapat dilaksanakan dengan optimal yaitu :

- 1) Penggunaan fiber optic, opsi ini yang paling dianjurkan karena kualitasnya lebih baik, ini digunakan bagi daerah/desa yang tidak terlalu jauh dari jaringan kabel fiber optic terdekat.
- 2) Triangle yaitu dengan membuat tiang pemancar kecil yang berfungsi sebagai penguat sinyal yang diambil dari BTS terdekat
- 3) VSAT yaitu akses internet yang menggunakan satelit, ini digunakan apabila kondisi geografis sangat terpencil/sulit dijangkau.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2023 Program Dumisake telah mencapai 80% dari target yang telah ditentukan. Kendala yang dialami pada jumlah anggaran yang tersedia ditengah refocusing anggaran dan lokasi sebaran titik blank spot. Direncanakan tahun 2024 akan tercapai 100%.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arahan strategi kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain:

- A. Kemenkominfo: Percepatan pengelolaan transformasi digital sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan strategi:
1. Penguatan koordinasi antar instansi pusat, untuk percepatan penyelesaian target SPBE dalam Rencana Induk dan Peta Rencana 2021-2025 melalui penyelarasan perencanaan dan penganggaran SPBE di K/L/D sebagai bagian program nasional, serta implementasi Arsitektur SPBE Nasional yang berbasis proses bisnis lintas sektor pemerintahan (Government Enterprise Architecture);
  2. Penguatan peran Tim Koordinasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat menyelaraskan perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi K/L/D, agar dapat mewujudkan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi (digital services), role model : Layanan Bantuan Pemerintah Terintegrasi dan Layanan Perizinan Pemerintah Terintegrasi;
  3. Percepatan terwujudnya sistem penghubung layanan pemerintah, sehingga terjadi kolaborasi data melalui penerapan manajemen data oleh seluruh wali data K/L/D dan interoperabilitas antar sistem yang sudah ada, menjadi layanan digital pemerintah yg terintegrasi (Smart Government);
  4. Percepatan pemanfaatan transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan Big Data Pemerintah dan

Kecerdasan Artifisial, sebagai bagian Transformasi Digital Nasional.

- B. BSSN: Penanganan ancaman siber untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, dengan strategi:

**Strategi Preventif:**

1. Penyelarasan Kebijakan dan Kegiatan dengan Strategi Keamanan Siber Nasional;
2. Melakukan pengujian keamanan secara berkala bagi system elektronik yang digunakan pada layanan publik;
3. Melakukan penilaian Tata Kelola keamanan siber;
4. Literasi keamanan siber pada pemangku kepentingan.

**Strategi Proaktif dan Reaktif:**

1. Penyusunan rencana kontigensi;
2. Pembentukan dan optimalisasi tugas Tim Tanggap Insiden Siber;
3. Melakukan pelaporan secara proaktif apabila terjadi insiden potensi ancaman keamanan siber.

**Strategi Deterrent:**

1. Kolaborasi dengan penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan kejahatan siber;
2. Membentuk forum koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

- C. BPS: Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, dengan strategi:

1. Adanya uraian tujuan, target, indikator yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat;
2. Mendukung kebijakan Perencanaan Pembangunan, SPBE, KSP, PDN, hasil keputusan Dewan Pengarah SDI dan isu strategis yang dilaksanakan oleh SDI;
3. Mendukung Daftar Data Prioritas yang dirumuskan Forum SDI tingkat pusat tahun 2020-2021 dari proses pengumpulan hingga

- penyebarluasan Data Prioritas termasuk Data Dana Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Dana Subsidi;
4. Program dan kegiatan yang akan dilakukan menerapkan prinsip-prinsip SDI yang meliputi standar data, metadata, kode referensi dan interoperabilitas data;
  5. Program dan kegiatan yang dilakukan mendukung pemanfaatan data mengacu pada data prioritas daerah dan pusat;
  6. Program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Aksi mendukung integrasi KRISNA dan SAKTI sesuai dengan kesepakatan Rapat Dewan Pengarah SDI;
  7. Memastikan kolaborasi antar penyelenggara SDI dalam implementasi tata Kelola data dan pengelolaan standar kualitas data yang terdapat dalam Portal

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Provinsi Jambi**

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kominfo Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dirumuskan untuk masing-masing tujuan, yaitu:

1. Meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi publik;
2. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral;
3. Meningkatnya kualitas layanan Administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terpadu;
4. Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi pemerintah daerah;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
6. Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi publik	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif/ 93
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	80%
3.	Meningkatnya kualitas layanan Administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terpadu	Indeks SPBE	3.2
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi	46%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	85 (B)
6	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	AKIP	74

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk menunjang tercapainya tujuan, sasaran serta indikator kinerja utama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi diimplementasikan melalui 5 Program yang di dukung 13 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan yaitu :

Program Prioritas :

#### 1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA.

Program ini bertujuan Penyediaan, pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi serta Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika (TIK) di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Program ini juga bertujuan untuk mendorong seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam ketersediaan Website untuk memberikan informasi Pemerintahan dan Pembangunan website dan aplikasi di Provinsi Jambi guna terwujudnya SPBE Pada program ini pula melaksanakan Program DUMISAKE dengan pengadaan akses internet bagi desa yang termasuk dalam kategori blank spot

#### 2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

Program ini bertujuan untuk melakukan diseminasi informasi dalam rangka memberikan layanan informasi terkait pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi, Peningkatan Kinerja dan kualitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik, optimalisasi Komisi Informasi sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, antara lain forum informasi, penanganan sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi.

#### 3. PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMAN INFORMASI.

Program ini merencanakan kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah terkait dengan persandian

#### 4. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL

Program ini mempunyai fungsi merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengumpulkan data urusan statistik sektoral.

#### PROGRAM PENUNJANG :

##### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi perkantoran dalam mewujudkan tertib administrasi, kenyamanan kerja serta peningkatan disiplin dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Rencana kinerja tahunan Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2025 terdiri 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang meliputi :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi SKPD
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
    - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Pengadaan Mebel
    - 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
    - 2) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
    - 3) Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- II. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
    - 1) Monitoring Informasi Kebijakan,Opini dan Aspirasi Publik
    - 2) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    - 3) Pelayanan Informasi Publik

- 4) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- 5) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- 6) Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi
  - 1) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi
  - 1) Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  - 2) Pembangunan/Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
  - 3) Keterhubungan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota ke jaringan intra pemerintah daerah provinsi
  - 4) Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  - 5) Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
  - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  - 2) Penyelenggaraan statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional
  - 3) Penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan prinsip satu data indonesia

V. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

- 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
  - 2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
  - 3) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan non elektronik
  - 4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Antar Perangkat Daerah Provinsi
- 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMINFO PROVINSI JAMBI**

#### **4.1 Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025**

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025 disesuaikan dengan Pagu Indikatif Rancangan KUA-PPAS. Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, merupakan gambaran dari Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Jambi untuk menunjang Jambi MANTAP 2024.

Dinas Kominfo Provinsi Jambi menangani 3 urusan wajib bukan urusan dasar yaitu :

1. Urusan Kominfo
2. Urusan Persandian
3. Urusan Statistik Sektoral

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Kominfo Provinsi Jambi terdiri dari 5 Program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan.
2. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan aplikasi informatika yang terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.
4. Program penyelenggaraan statistik sektoral yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi yang terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan Dinas Kominfo Provinsi jambi.

Melalui 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan Dinas Kominfo Provinsi disusun secara spesifik, realistis dilengkapi dengan indikator Kinerja dan target capaian kinerja yang terukur sehingga dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan, target kinerja dan sasaran kegiatan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu Program Kegiatan.

Program yang telah ditetapkan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk mengukur input dan output perlu indikator yang jelas setiap kegiatan, karena Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil , manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capai kinerja suatu program atau kegiatan.

Secara rinci Rancangan Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 dengan Total Anggaran Rp.40,000,000,000- (Empat Puluh Milyar Rupiah) dijabarkan dalam 5 Program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan kegiatan sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.16:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase capaian kinerja	Jambi	85 (BB)	13,218,572,539	PAD		90 (BB)	13,615,000,000
		<i>Persentase meningkatnya kualitas perencanaan OPD</i>							
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Jambi		318,859,902				310,000,000
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.	Jambi	2 Dokumen	27,630,072	PAD		2 Dokumen	32,000,000
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jambi	2 Dokumen	274,869,830	PAD		2 Dokumen	260,000,000

2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Jambi	3 Laporan	5,080,000	PAD		3 Laporan	6,000,000
2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		3 Laporan	11,280,000	PAD		3 Laporan	12,000,000
<b>2.16.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan</b>	Jambi		<b>10,391,444,200</b>				<b>9,773,500,000</b>
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jambi	90 Orang/ Bulan	9,992,510,000	DAU		90 Orang/ Bulan	9,350,000,000
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jambi	12 Dokumen	391,434,400	PAD		12 Dokumen	415,000,000
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jambi	1 Dokumen	7,499,800	PAD		1 Dokumen	8,500,000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan Bimtek/Diklat bagi ASN</b>	Jambi		<b>395,688,800</b>				<b>455,000,000</b>
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jambi	25 orang	272,488,800	PAD		25 orang	285,000,000

2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jambi	3 Paket	123,200,000	PAD		3 Paket	170,000,000
<b>2.16.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum OPD</b>	Jambi		<b>921,420,408</b>				<b>1,034,000,000</b>
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jambi	2 Paket	225,024,168	PAD		2 Paket	260,000,000
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jambi	12 Paket	45,144,000	PAD		12 Paket	50,000,000
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jambi	6 Paket	45,144,000	PAD		6 Paket	55,000,000
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jambi	5 Dokumen	70,950,240	PAD		5 Dokumen	89,000,000
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jambi	12 Laporan	535,158,000	PAD		12 Laporan	580,000,000
<b>2.16.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>persentase tersedianya</b>	Jambi		<b>1,149,879,274</b>				<b>1,140,000,000</b>

	Urusan Pemerintah Daerah	Barang/peralatan kantor							
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jambi	17 unit	379,497,326	PAD		17 unit	390,000,000
2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jambi	1 unit	554,258,000	PAD		1 unit	510,000,000
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jambi	20 Paket	216,123,948	PAD		20 Paket	240,000,000
<b>2.16.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Jambi		<b>41,279,955</b>				<b>45,500,000</b>
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jambi	12 Laporan	2,491,395	PAD		12 Laporan	4,000,000
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jambi	1 Laporan	16,800,000	PAD		1 Laporan	17,500,000
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jambi	1 Laporan	21,988,560	PAD		1 Laporan	24,000,000

<b>2.16.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan Barang Milik daerah</b>	Jambi		<b>734,048,800</b>				<b>857,000,000</b>
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jambi	26 unit	464,936,000	PAD		26 unit	540,000,000
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jambi	2 unit	204,272,800	PAD		2 unit	250,000,000
2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jambi	26 unit	64,840,000	PAD		26 unit	67,000,000
2:16:02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah</b>		<b>85%</b>	<b>16,923,549,473</b>			<b>85%</b>	<b>18,085,000,000</b>

		<b>Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah</b>		<b>85</b>					
2.16.02.1.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah laporan dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada kementerian komunikasi dan informasi</b>	Jambi	12 Laporan	<b>16,923,549,473</b>			12 Laporan	<b>18,085,000,000</b>
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemerintah	Jambi	1 Dokumen	316,995,200	PAD		1 Dokumen	425,000,000
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar	Jambi	220 Media	13,000,000,000	PAD		220 Media	13,015,000,000

		sesuai kriteria/juknis							
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jambi	12 Permohonan	250,000,000	PAD		12 Permohonan	270,000,000
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di dinas kominfo	Jambi	35 Komunitas	2,197,589,500	PAD		35 Komunitas	2,215,000,000
2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Jambi	180 orang	219,440,600	PAD		180 orang	250,000,000
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jambi	12 Laporan	1,869,312,160	PAD		12 Laporan	1,910,000,000
<b>2:16:03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi</b>	Jambi		<b>7,355,953,684</b>				<b>9,345,000,000</b>

		dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah							
		Persentase pembangunan SPBE		50					
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah	Jambi	1 Dokumen	153,064,065			1 Dokumen	270,000,000
2.16.03.1.01.0004	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah	Jambi	1 Dokumen	153,064,065	PAD		1 Dokumen	270,000,000
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemda	Jambi	1 Laporan	7,202,889,619			1 Laporan	9,075,000,000
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemda	Jambi	1 Laporan	183,212,800	PAD		1 Laporan	200,000,000

2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jambi	21 Aplikasi	613,483,400	PAD		21 Aplikasi	625,000,000
2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah provinsi	Jambi	5 Kabupaten /Kota	350,000,000	PAD		5 Kabupaten /Kota	500,000,000
2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas	Jambi	43 Perangkat Daerah	5,556,017,419	PAD		43 Perangkat Daerah	7,200,000,000
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Jambi	21 Aplikasi	500,176,000	PAD		21 Aplikasi	550,000,000
<b>2:20:02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase ketersediaan data statistik sektoral</b>	Jambi		<b>254,011,900</b>				
<b>2.20.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</b>	Jambi	<b>90%</b>	<b>254,011,900</b>			<b>95%</b>	<b>320,000,000</b>

2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Jambi	108 Orang	66,928,000	PAD		108 Orang	100,000,000
2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	Jambi	90 Persentase	102,127,900	PAD		90 Persentase	120,000,000
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi meta data	Jambi	1 Dokumen	84,956,000	PAD		1 Dokumen	100,000,000
2:21:02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Indeks kematangan keamanan informasi</b>	Jambi		<b>583,219,717</b>			<b>55%</b>	<b>745,000,000</b>
		<b>Tingkat kematangan keamanan informasi</b>		<b>54%</b>					
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi	Jambi		<b>545,993,717</b>				<b>695,000,000</b>

		<b>pemerintah daerah yang ditetapkan</b>							
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Jambi	1 Dokumen	18,109,972	PAD		1 Dokumen	25,000,000
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Jambi	1 Laporan	228,129,500	PAD		1 Laporan	300,000,000
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik	Jambi	1 Laporan	118,495,845	PAD		1 Laporan	150,000,000
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi	Jambi	1 Dokumen	181,258,400	PAD		1 Dokumen	220,000,000

		pemerintah daerah yang ditetapkan							
<b>2.21.02.1.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jambi</b>	Jambi		<b>37,226,000</b>				<b>50,000,000</b>
2.21.02.1.02.0001	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	Jambi	15 Perangkat Daerah	37,226,000			15 Perangkat Daerah	50,000,000

#### **4.2 Rencana Pendanaan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada tahun 2025 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kominfo Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.40,000,000,000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja Diskominfo berasal seluruhnya dari APBD yang didukung oleh 5 program dan 13 kegiatan.

## BAB V

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, tersaji dalam suatu perencanaan yang tersusun secara sistematis dan menganut Asas Keputusan sehingga dalam menyusun DPA-SKPD diharapkan mampu mencerminkan Input dan OUT-PUT Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025.

Sebagai bagian penutup dari Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025 salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Jambi, 28 Juni 2024

**KEPALA DINAS,**



**Drs. ARIANSYAH, ME**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19720603 199302 1 001

